JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2024, Volume 3, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm. 62 - 69
e-ISSN: 2963-2072

PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA PADA ERA PRA KEMERDEKAAN DAN ERA KEMERDEKAAN

Alpina Agustin[1*], Annisa Amalia[2], Asna[3], Fitriani[4], Ahmad Mubarak[5]
[1-5] Program Studi PGSD Universitas Sapta Mandiri Balangan
e-mail : alpinaagustina@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dengan mengumpulkan bebrapa buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Adapun isi pada penelitian ini adaah membahasa pada era pra-kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Nusantara yang tercermin dari tradisi lokal, adat istiadat, dan filosofi bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan persatuan menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Kesadaran nasional mulai tumbuh melalui perlawanan terhadap penjajah, yang berpuncak pada Sumpah Pemuda 1928, sebagai langkah awal menyatukan visi kebangsaan. Pada era kemerdekaan, Pancasila secara resmi dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Proses ini melibatkan para pendiri bangsa yang menyusun Pancasila sebagai dasar yang mampu mengakomodasi keragaman Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila menjadi pedoman dalam membangun pemerintahan yang berdaulat dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan, seperti agresi militer, konflik ideologis, dan krisis politik.

Kata Kunci: Pancasila; Sejarah Bangsa; Era Pra Kemerdekaan; Era Kemerdekaan

Abstract: *This research uses a library study method by collecting several books and journals related to this research. The content of this research discusses that in the pre-independence era, Pancasila values existed in the lives of the people of the archipelago, which were reflected in local traditions, customs and national philosophy. Values such as mutual cooperation, deliberation, tolerance and unity are the hallmarks of Indonesian society. National awareness began to grow through resistance against the colonialists, culminating in the 1928 Youth Pledge, as the first step to unite the national vision. In the era of independence, Pancasila was officially formulated and established as the basis of the state on August 18 1945. This process involved the founding fathers of the nation who drafted Pancasila as a basis capable of accommodating Indonesia's diversity. After the Proclamation of Independence, Pancasila became a guideline in building a sovereign government and maintaining unity amidst various challenges, such as military aggression, ideological conflict and political crisis.*

Keywords: *Pancasila; National History; Pre-Independence Era; Independence Era*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kemerdekaan. Sebagai rumusan nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang sejak masa pra-kemerdekaan. Kajian sejarah tentang Pancasila menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini dirumuskan melalui proses diskusi, perdebatan, dan konsensus yang melibatkan

para pendiri bangsa. Sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menjadi salah satu momen kunci dalam sejarah perumusan Pancasila, di mana ide-ide dari berbagai golongan dan latar belakang digabungkan menjadi satu kesatuan yang merepresentasikan identitas bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Namun, ternyata pengamalan atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan.

Mengutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung dari 1945 hingga 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Artinya warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan ditemui banyak permasalahan, diantaranya:

1. Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun, pada 18 September 1948. Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis.
2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya.
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri.
4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat.

Lain halnya pada masa orde lama, penerapan Pancasila pada masa orde lama, terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis.

Sementara pada masa orde baru, dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, diadakannya PEMILU, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan.

Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima

Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto, juga ditemui beberapa masalah, seperti kasus KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dwifungsi ABRI.

Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Baca juga: Contoh Penerapan Sila Pertama Pancasila Maka bisa ditarik kesimpulan jika penerapan Pancasila dari masa ke masa selalu mengalami permasalahan atau kendala. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat.

Dalam konteks sejarah, Pancasila tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi proses pembentukannya. Dengan memahami latar belakang sejarah tersebut, kita dapat lebih menghargai relevansi Pancasila sebagai ideologi yang mampu menjawab tantangan bangsa dari masa ke masa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, dari proses pembentukannya hingga implementasinya sebagai dasar negara yang kokoh dan dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka. Pengertian studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Melalui pendapat para ahli di atas, maka bisa ditarik kesimpulan. Studi kepustakaan adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun. Adanya referensi membantu mengembangkan tulisan, tidak hanya agar bisa real atau terasa efek nyatanya. Melainkan juga untuk menjadikan tulisan lebih berbobot atau lebih berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sekaligus ideologi bangsa yang menjadi pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti asas, prinsip, atau dasar. Dengan demikian, Pancasila berarti lima asas atau prinsip yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah yang panjang dan merupakan hasil dari konsensus nasional para pendiri bangsa. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Dalam prosesnya, rumusan Pancasila

mengalami beberapa perubahan hingga mencapai bentuk final yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima sila dalam Pancasila meliputi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sekaligus menghormati kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang berlandaskan pada moralitas dan etika.
3. Persatuan Indonesia: Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tengah keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mengutamakan demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Pancasila memiliki fungsi yang sangat luas, baik sebagai dasar negara, pandangan hidup, maupun ideologi bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman moral bagi individu dan masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertindak. Sementara itu, sebagai ideologi bangsa, Pancasila berperan sebagai pemersatu dan penuntun dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.

Keistimewaan Pancasila terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi keragaman yang ada di Indonesia, tanpa menghilangkan identitas asli bangsa. Nilai-nilai Pancasila berakar pada budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, sehingga memiliki daya tahan terhadap perubahan zaman sekaligus relevansi yang terus terjaga. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum dan ideologi, tetapi juga menjadi jiwa dan karakter bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kebangsaan.

Era Pra Kemerdekaan

Pada era pra-kemerdekaan, Pancasila belum dikenal sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini tercermin dalam kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat yang berkembang di berbagai daerah. Perjuangan untuk merumuskan dasar negara yang akhirnya menjadi Pancasila dimulai pada akhir masa penjajahan, terutama ketika kesadaran nasionalisme semakin menguat di kalangan masyarakat dan pemimpin bangsa.

1. Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Pra-Kemerdekaan
   Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Majapahit, Sriwijaya, hingga Mataram, terdapat nilai-nilai yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Contohnya:
   a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Kehidupan masyarakat Nusantara sudah diwarnai oleh kepercayaan kepada Tuhan atau kekuatan supranatural, baik dalam bentuk agama Hindu, Buddha, Islam, maupun kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme.
   b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Kehidupan masyarakat tradisional

seringkali menjunjung nilai gotong royong dan rasa saling menghormati.

c. Sila Persatuan Indonesia: Pada masa kerajaan, semboyan "Bhineka Tunggal Ika" dari Kakawin Sutasoma menggambarkan semangat persatuan meskipun terdapat keragaman agama dan budaya.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Sistem musyawarah sudah menjadi tradisi di banyak komunitas adat Nusantara.
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pada masa itu, prinsip keadilan diterapkan dalam hubungan antara raja dan rakyat melalui berbagai sistem pembagian hasil bumi dan kewajiban sosial.

2. Perlawanan terhadap Penjajahan

   Perlawanan terhadap penjajahan menunjukkan awal mula munculnya kesadaran nasional yang didasarkan pada nilai-nilai persatuan (sila ketiga). Perlawanan ini awalnya bersifat lokal dan sporadis, seperti perlawanan Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan Pattimura. Namun, pada awal abad ke-20, kesadaran nasional mulai berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir.

   Kemunculan organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), dan Indische Partij (1912) menjadi cikal bakal perjuangan yang lebih modern. Nilai-nilai Pancasila mulai tampak dalam semangat perjuangan nasional, terutama dalam upaya memperjuangkan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan.

3. Sumpah Pemuda (1928)

   Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah pra-kemerdekaan. Semangat persatuan yang diusung oleh para pemuda dari berbagai daerah menjadi cerminan nyata sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sumpah tersebut, para pemuda berikrar untuk:

   a. Bertanah air satu, tanah air Indonesia.
   b. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.
   c. Berbahasa satu, bahasa Indonesia.

   Sumpah Pemuda juga memperlihatkan bagaimana keragaman budaya dan bahasa di Indonesia dapat dipersatukan dalam satu identitas nasional.

4. Pendudukan Jepang (1942–1945)

   Masa pendudukan Jepang membawa tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Jepang memperbolehkan para pemimpin Indonesia untuk mulai mempersiapkan kemerdekaan, meskipun dengan pengawasan ketat. Pada masa ini, nilai-nilai Pancasila mulai dirumuskan secara eksplisit melalui diskusi dan perdebatan para tokoh bangsa.

   Pada tahun 1944, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas mempersiapkan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI inilah gagasan awal Pancasila mulai muncul, meskipun belum secara formal disebut sebagai "Pancasila".

5. Awal Munculnya Gagasan Dasar Negara

   Dalam sidang BPUPKI yang pertama (29 Mei–1 Juni 1945), beberapa tokoh mengusulkan dasar negara.

   a. Mr. Muhammad Yamin: Pada 29 Mei 1945, Yamin menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang mencakup lima prinsip, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan,

Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Dr. Soepomo: Pada 31 Mei 1945, Soepomo menekankan konsep negara integralistik, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Ir. Soekarno: Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memuat lima sila sebagai dasar negara, yang kemudian dinamakan "Pancasila".

Era Kemerdekaan

Era kemerdekaan merupakan periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Periode ini dimulai dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan upaya pembentukan sistem pemerintahan yang berdaulat. Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologis tetapi juga berperan dalam menyatukan bangsa yang majemuk di tengah berbagai tantangan politik, sosial, dan ekonomi.

1. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
   Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum secara resmi Pancasila sebagai dasar negara dengan susunan sila yang final:
   a. Ketuhanan Yang Maha Esa
   b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
   c. Persatuan Indonesia
   d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
   e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

   Penetapan ini merupakan hasil dari proses panjang, termasuk perumusan sebelumnya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Sembilan. Rumusan Pancasila disepakati sebagai dasar negara yang mampu mengakomodasi keanekaragaman budaya, agama, dan pandangan di Indonesia.
2. Implementasi Pancasila dalam Pemerintahan Awal
   Pada era awal kemerdekaan, implementasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan, seperti:
   a. Masalah internal: Terjadinya pemberontakan dan konflik ideologis, seperti pemberontakan PKI di Madiun (1948) dan pemberontakan DI/TII (1949-1962).
   b. Agresi militer Belanda: Upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia melalui agresi militer, yang memaksa bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi dan militer.

   Meskipun dalam situasi sulit, prinsip-prinsip Pancasila tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Persatuan (sila ketiga) menjadi modal utama dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal, sementara keadilan sosial (sila kelima) menjadi cita-cita yang terus diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.
3. Pancasila dalam Sistem Demokrasi Awal
   Pada masa awal kemerdekaan (1945-1959), Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini memberi ruang bagi berbagai partai politik dengan ideologi yang beragam, seperti nasionalisme, Islam, dan komunisme. Namun, perbedaan ideologi ini

sering kali memicu ketegangan politik.

Upaya untuk memperkuat peran Pancasila dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga negara. Pancasila dipandang sebagai perekat untuk menjaga stabilitas nasional di tengah keberagaman ideologi yang ada.

4. Penegasan Pancasila melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

   Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara, setelah kegagalan konstituante untuk menyusun konstitusi baru. Dekrit ini juga menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara.

   Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, Pancasila kembali menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dekrit ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi krisis politik yang terjadi akibat perpecahan di parlemen dan ketidakstabilan politik.

5. Relevansi Pancasila pada Era Kemerdekaan

   Pada era kemerdekaan, Pancasila berperan sebagai:

   a. Landasan Hukum dan Ideologi Negara: Pancasila menjadi dasar untuk membentuk undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
   b. Pemersatu Bangsa: Pancasila menjadi simbol persatuan bagi masyarakat yang majemuk, dengan berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya.
   c. Panduan Moral dan Etika: Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik, baik internal maupun eksternal, berdasarkan prinsip musyawarah dan keadilan.

KESIMPULAN

Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konseptual, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas, kearifan lokal, dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi kepercayaan kepada Tuhan, penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pada era pra-kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Nusantara yang tercermin dari tradisi lokal, adat istiadat, dan filosofi bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan persatuan menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Kesadaran nasional mulai tumbuh melalui perlawanan terhadap penjajah, yang berpuncak pada Sumpah Pemuda 1928, sebagai langkah awal menyatukan visi kebangsaan.

Pada era kemerdekaan, Pancasila secara resmi dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Proses ini melibatkan para pendiri bangsa yang menyusun Pancasila sebagai dasar yang mampu mengakomodasi keragaman Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila menjadi pedoman dalam membangun pemerintahan yang berdaulat dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan, seperti agresi militer, konflik ideologis, dan krisis politik.

Secara keseluruhan, Pancasila adalah fondasi utama yang dirumuskan melalui perjalanan sejarah panjang dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Pancasila tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga terus menjadi panduan dalam menghadapi tantangan zaman, dengan nilai-nilai yang universal dan berakar pada budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. JIS: Journal Islamic Studies, 1(3), 391–398. Retrieved from

Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 2(1), 49–53. Retrieved from

Mubyarto. (2005). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 1(1), 265–278.

Ngalimun. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.

Nurhadi, D. (2018). Gerakan Nasionalisme Indonesia pada Era Pra-Kemerdekaan: Sebuah Tinjauan Sejarah. Jurnal Sejarah dan Budaya, 6(2), 40-55.

Rahardjo, A. (2016). Masa Awal Perjuangan Nasionalisme Indonesia: Dari Sumpah Pemuda hingga Proklamasi. Jurnal Kajian Sejarah, 4(1), 18-32.

Subiakto, P. (2019). Pemikiran Sosial Politik dalam Pergerakan Nasional Indonesia di Masa Pra-Kemerdekaan. Jurnal Sejarah Politik, 3(1), 45-58.

Sulistyo, H. (2020). Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan: Perjuangan Menghadapi Agresi Belanda. Jurnal Sejarah Nasional, 4(1), 24-38.

Sumarsono, A. (2016). Pancasila: Konsep, Sejarah, dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryadi, T. (2017). Peran Pergerakan Nasional dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Sejarah Indonesia, 5(3), 23-38.

Suryadi, T. (2018). Perjuangan Politik Indonesia Pasca-Kemerdekaan: Dari Demokrasi Parlementer hingga Orde Baru. Jurnal Sejarah Indonesia, 5(2), 56-72.

Syamsudin, A. (2019). Pengertian Pancasila: Sejarah dan Makna dalam Konteks Kehidupan Bangsa Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, 12(2), 100-110.